

## **CAPACITY BUILDING DAN NETWORKING BERBASIS EKONOMI BIRU (*BLUE ECONOMY*) PADA MASYARAKAT PESISI TELUK SALEH LABUHAN SANGORO-MARONGE, KABUPATEN SUMBAWA**

**Syaiful Anam\*, Hasbi Asyidiqi, Kurnia Zulhandayani,  
Ahmad Mubarak Munir**

*Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia*

*Alamat Korespondensi: s.anam@unram.ac.id*

### **ABSTRAK**

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat pesisir memainkan peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Ekonomi Biru. Program ini menilai dampak dari program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir di Labuhan Sangoro, Sumbawa. Melalui pendekatan holistik, program ini menggabungkan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha berbasis komunitas, dan peningkatan akses terhadap teknologi dan dukungan finansial. Networking yang dibangun selama kegiatan berperan penting dalam memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, memungkinkan aliran informasi dan sumber daya yang lebih efektif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. Saran untuk tindak lanjut mencakup perluasan program pelatihan, penguatan kemitraan strategis, dan penerapan mekanisme evaluasi untuk menilai dampak dan efektivitas strategi yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Ekonomi Biru dapat terus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Kata Kunci:** Ekonomi Biru, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Peningkatan Kapasitas, Networking, Pembangunan Berkelanjutan

### **PENDAHULUAN**

Ekonomi biru merupakan suatu konsep berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya laut untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta menjaga ekosistem laut agar tetap dapat dilestarikan dengan jangka waktu yang panjang. Bank dunia mendefinisikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian, dan menciptakan lapangan kerja, sambil tetap melindungi kesehatan ekosistem laut (Rahim et al., 2024). Dapat dikatakan inti dari ekonomi biru adalah mengupayakan kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial tanpa menyebabkan degradasi lingkungan seperti yang sudah terjadi di banyak negara, sehingga konsep ini bertujuan untuk menyesuaikan aktivitas ekonomi dengan prinsip perdagangan berkelanjutan, serta menggabungkan upaya konservasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan maritim. Dengan demikian, ekonomi biru (blue economy) mendorong pembentukan investasi kreatif dan inovatif dalam sektor kelautan, melalui peningkatan variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan perbaikan manajemen sumber daya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sembari memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga (Rahim et al., 2024).

Sebagai negara maritim, tentunya Indonesia sangat menekankan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi biru. Hal ini telah ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Brazil. Beliau menekankan pentingnya ekonomi biru bagi

Indonesia dibandingkan dengan ekonomi hijau yang berfokus pada daratan. Maka dari itu, untuk mendukung pengimplementasian ekonomi biru, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kembali pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang kelautan, terutama bagi mereka yang tinggal dekat dengan pesisir pantai. Melalui pendekatan inovatif, edukasi, dan penerapan teknologi kelautan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penangkapan ikan dan budi daya hasil laut. Kemudian dalam pembangunan infrastruktur maritim seperti pelabuhan, fasilitas pengolahan, dan jaringan pemasaran hasil perikanan, perlu perhatian lebih dari pemerintah (Rahim et al., 2024). Dengan demikian, penerapan ekonomi biru diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan namun juga tetap menjaga kualitas dan keberagaman hayati laut yang ada di Indonesia.

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan penerapan konsep ekonomi biru dalam rangka untuk memajukan pembangunan ekonomi yakni adanya integrasi dari sektor perikanan negara atau industrialisasi sektor perikanan dengan masyarakat pesisir yang umumnya pelaku usaha perikanan. Bentuk integrasinya adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pesisir agar adanya hubungan timbal balik antara masyarakat pesisir, negara, maupun pemilik modal dalam usaha perikanan. Pemberdayaan masyarakat ini ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan konsep ekonomi biru karena mengacu pada negara-negara maju yang telah berhasil dalam mengimplementasikan konsep ekonomi biru di negaranya, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Swedia. Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan konsep ekonomi biru yakni kemampuan sumber daya manusia dari masyarakat pesisir Indonesia yang belum dapat memanfaatkan besarnya potensi hasil laut. Mayoritas masyarakat pesisir Indonesia hanya berfokus pada penangkapan ikan dan kekayaan laut lainnya tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut serta belum memiliki kemampuan untuk mengolah hasil tangkapan sebagai suatu komoditas ekonomi yang unggul (Teguh Kadyat Yudharto, S.T., 2023).

Wilayah pesisir secara umum dapat dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yakni sebagai suatu daerah yang menjadi peralihan antara ekosistem darat dan laut, dimana perubahan yang terjadi di daerah tersebut dipengaruhi langsung oleh darat dan laut (Yonvitner et al., 2016). Wilayah pesisir seringkali dianggap sebagai daerah yang memiliki segudang manfaat dari segi sumber daya alam akibat adanya transisi antara daratan dan lautan, yang akhirnya mampu menciptakan daerah dengan ekosistem yang beragam sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan produktivitas dari masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Jika melihat dari sejarah yang ada, wilayah pesisir Indonesia telah berperan aktif dalam membentuk peradaban pribumi Indonesia yang modern. Pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan strategis dapat ditelusuri sebagai gerbang utama kedatangan bagi para penjelajah dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana alami.

Masyarakat yang mendiami lokasi pesisir ini sendiri disebut sebagai masyarakat pesisir (*coastal community*). Lebih jauhnya, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang hidup di wilayah pertemuan daratan dan lautan, dimana ekosistem dan aktivitas manusia saling berhubungan (Thomsen et al., 2009) (Nain, 2022). Aktivitas yang dimaksud ialah kegiatan sosial-ekonomi yang berhubungan erat dengan sumber daya alam yang tersedia di wilayah pesisir dan lautan, yang akhirnya membentuk sebuah kumpulan individu (Prayuda et al., 2019). Hal ini juga merujuk pada pola karakteristik dari masyarakat pesisir, yakni 1) segi pencaharian, masyarakat pesisir cenderung menggantungkan perekonomian mereka pada laut dan hasilnya. Hal ini dibuktikan oleh profesi masyarakat yang didominasi sebagai nelayan, penambak dan budidaya ikan serta biota laut lainnya, penghasil garam, penambang pasir, pedagang ikan, pembuat perahu, bahkan penyedia transportasi laut (Prayuda et al., 2019). 2) Kehidupan yang bergantung pada alam dan lingkungan, dimana hal ini berpengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat. Terdapat sebuah kondisi yang menyebabkan pendapatan para masyarakat pesisir bergerak secara fluktuasi, misalnya yang terjadi pada para nelayan. Mereka bergantung pada musim dan perhitungan kalender bulan, yakni ketika suatu waktu mereka akan mendapat tangkapan yang banyak dan diwaktu lainnya mereka mendapatkan tangkapan yang sedikit bahkan tidak ada. 3) Pola sosial. Masyarakat pesisir disebutkan oleh Antonio Gramsci sebagai masyarakat yang *sulbatern* yakni kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan (dalam konteks yang luas) (Susilowati, 2019).

Namun, dalam kehidupan sosialnya mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang

seringkali didalamnya terdapat tingkatan hierarki (stratifikasi sosial) yang kuat. Masyhuri dalam karyanya yang berjudul “Menyisir Pantai Utara Jawa” menyebutkan bahwa terdapat perbedaan kasta antara siklus kelompok yang didalamnya terdapat nelayan, penjual ikan, pedagang ikan, dan Nahkoda. Dalam stratifikasi sosial ini, nahkoda memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara yang lainnya, sehingga memiliki keterbukaan terhadap posisi pemangku kepentingan dan kekuasaan (Susilowati, 2019). Pola lainnya yang dapat dilihat adalah dari segi posisi perempuan dan anak dalam ekonomi keluarga (Donna NP Butarbutar et al., 2020), juga bagaimana masyarakat pesisir masih menjunjung tinggi adat, budaya serta tradisi terdahulu (Nainggolan et al., 2023).

Desa Labuhan Sangoro merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa yang mendiami bagian utara Pulau Sumbawa ini memiliki luas daratan 41,019 km<sup>2</sup> dan luas laut 122,984 km<sup>2</sup> (Rizal et al., 2014), dihuni oleh 598 kepala keluarga (KK) dengan total penduduk tetap yakni 1.941 jiwa (Desa Labuhan Sangoro, 2023). Desa Labuhan Sangoro memiliki jangkauan wilayah yang berbeda jika dibandingkan dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Maronge, dimana desa ini melingkupi dua pulau yang terbagi dalam tiga dusun. Dusun A dan B desa ini menyatu dengan Pulau Sumbawa secara utuh, sedangkan Dusun Gili Tapan berada diseberang timur pulau, yang dipisahkan oleh laut. Sebagaimana desa pesisir pada umumnya, profesi masyarakat Labuhan Sangoro didominasi oleh nelayan. Dari jumlah keseluruhan, nelayan memiliki presentasi paling banyak yakni 37%, disusul oleh petani dan buruh tani sebanyak 36%, peternak 20%, serta 7% diisi oleh profesi lainnya seperti pegawai dinas dan pelaku UMKM. Masyarakat Desa Labuhan Sangoro juga memiliki kriteria masyarakat pesisir seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ditambah dengan corak masyarakat yang sangat kompetitif.

Dengan mempelajari analisis situasi dan potensi yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman terkait penerapan konsep ekonomi biru untuk keberhasilan dalam memperdayakan masyarakat pesisir secara ideal dengan berbagai bentuk upaya yang dilakukan dalam peningkatannya.
2. Perlunya pemahaman terkait dengan mengelola sebuah permasalahan dan menciptakan sebuah solusi yang mumpuni dalam jangka panjang, serta peningkatan pengetahuan akan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan laut..

Kerangka pemecahan masalah dalam program ini ialah dengan mendistribusikan pengetahuan mendasar tentang edukasi konsep ekonomi biru yang ditanamkan sedari muda melalui kelompok kepemudaan.

## METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini ialah melalui workshop yang diisi dengan penyampaian materi oleh pemateri, dengan fokus bahasan yang berbeda satu sama lain namun tetap dalam tema yang diusung.

Adapun pelaksanaan workshop ini memiliki *Rundown* tersendiri seperti yang tergambar pada kolom di bawah ini:

Waktu (WITA)	Durasi	Susunan Acara	Narasumber /Petugas	Keterangan	Waktu (WITA)
08.00 – 08.30	30”	Open Gate	Panitia	Panitia membuka sesi registrasi.	08.00 – 08.30
08.30 – 08.35	5”	Pembukaan	MC	MC membuka acara dengan salam penghormatan	08.30 – 08.35
08.35 – 08.45	10”	Sambutan Dosen Pembimbing	Bapak Syaiful Anam, S.IP., M.Sc., MIS	Dosen pembimbing memberikan kata sambutan.	08.35 – 08.45

Waktu (WITA)	Durasi	Susunan Acara	Narasumber /Petugas	Keterangan	Waktu (WITA)
08.45 – 08.50	5”	Peralihan	MC	MC mempersilahkan moderator untuk memandu acara selanjutnya	08.45 – 08.50
08.50 – 08.55	5’	Pembukaan Moderator	Moderator	Membuka acara dengan menyambut peserta, memberikan gambaran tema acara, dan memperkenalkan pemateri/pembicara	08.50 – 08.55
08.55 – 09.20	30”	Penyampaian Materi	Bapak Taufiq Hizbul Haq	Pemateri memaparkan materi selama 30 menit	08.55 – 09.20
09.20 – 09.50	30”	Penyampaian Materi	Bapak Lilik Triyanto	Pemateri memaparkan materi selama 30 menit	09.20 – 09.50
09.50 – 10.05	15”	Sesi QnA	Moderator	Moderator memberikan sesi QnA kepada peserta selama 15 menit	09.50 – 10.05

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah:

1. Pemetaan dan Pendekatan ke Masyarakat Pesisir  
Dasar dari pemetaan ini adalah untuk menentukan mengenai pola masyarakat pesisir, permasalahan permasalahan yang dihadapi, dan potensi masyarakat pesisir.
2. Penyusunan Materi dan Rangkaian Kegiatan.  
Pada tahap ini tim menyusun materi terkait Ekonomi Biru, Masyarakat Pesisir, dan Potensi Teluk Saleh. Rencana kegiatan disusun dan dibuat dalam bentuk timeline kegiatan.
3. Penyuluhan  
Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan yang lebih kekeluargaan untuk mensosialisasikan informasi, skill, dan pengetahuan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menghadapi kebijakan Ekonomi Biru di wilayah Teluk Saleh.
4. Evaluasi  
Evaluasi dari program ini yaitu untuk menilai kembali tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan setelah kegiatan dengan menggunakan metode interview dan survey menggunakan skala likert berdasarkan poin-poin yang sudah disampaikan selama kegiatan. Selain interview dan survey, evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pola perilaku masyarakat setelah program berjalan.

Sasaran kegiatan dalam *Workshop Capacity Building* dan *Networking* Berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy) Pada Masyarakat Pesisir Teluk Saleh Labuhan Sangoro-Maronge, Kabupaten Sumbawa berikut daftar peserta yang kami libatkan dalam *workshop* ini:

1. Valosentra
2. Tirta Metha
3. Karang Taruna Labuan Sangoro

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan, beberapa persiapan berikut telah dilaksanakan agar program dapat berjalan optimal, yaitu:

1. Tentukan Tujuan dan Peserta: Tentukan tujuan utama workshop dan siapa saja yang akan diundang.
2. Siapkan Materi dan Narasumber: Buat materi yang jelas dan relevan. Pilih narasumber yang paham topik yang akan dibahas.
3. Atur Lokasi dan Waktu: Pilih lokasi yang mudah dijangkau dan tentukan waktu yang cocok untuk peserta.
4. Sediakan Perlengkapan Dasar: Pastikan tersedia alat-alat seperti proyektor, papan tulis, dan bahan tulis.
5. Undang Peserta: Kirim undangan kepada peserta dan pastikan mereka mengonfirmasi kehadiran.
6. Lakukan Simulasi Singkat: Cek jalannya acara dan pastikan semua persiapan sudah siap.
7. Evaluasi Sederhana: Siapkan cara sederhana untuk mengukur hasil workshop, misalnya kuesioner singkat.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan dengan metode penyampaian materi mengenai penerapan konsep ekonomi biru dan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta dialog interaktif antara pemateri dan peserta. Materi yang disampaikan yaitu menjelaskan Blue Economy atau Ekonomi Biru adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya laut dan pesisir dengan cara yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Konsep sustainability, atau keberlanjutan, menjadi inti dari Ekonomi Biru, di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak ekosistem laut. Contoh implementasi konsep sustainability dalam Ekonomi Biru termasuk budidaya ikan yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah laut, dan pengembangan ekowisata yang tidak merusak habitat alami. Potensi wilayah pesisir sangat besar, mulai dari sumber daya perikanan yang melimpah hingga potensi pariwisata yang menarik. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat di wilayah pesisir memerlukan tahapan yang sistematis dalam melaksanakan pilot project. Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan lokal, perencanaan kegiatan berbasis masyarakat, pelaksanaan proyek, dan evaluasi hasil. Opsi kegiatan dalam pengembangan masyarakat pesisir bisa meliputi pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha bersama, pengembangan infrastruktur pendukung, dan promosi produk lokal. Dengan pendekatan ini, Blue Economy tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir.

Pembahasan yang kedua mengenai pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dengan pendekatan holistik adalah suatu strategi yang menekankan keterlibatan aktif komunitas lokal dalam mengelola sumber daya perikanan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, memadukan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses pengelolaan ini dimulai dengan pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat pesisir, diikuti dengan perencanaan strategis yang melibatkan komunitas dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan. Implementasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pembentukan mekanisme pengawasan bersama. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan tercapai dan dampak positif terus berlanjut.

Dukungan regulasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan strategi ini. Regulasi yang mendukung meliputi kebijakan yang memfasilitasi partisipasi masyarakat, perlindungan terhadap ekosistem laut, dan pengaturan yang jelas mengenai hak akses dan pemanfaatan sumber daya. Pemerintah, melalui peraturan dan kebijakan, serta lembaga-lembaga terkait, menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan perikanan. Tujuan utama dari pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dengan pendekatan holistik adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi lingkungan. Ini melibatkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem laut. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan, diharapkan akan tercipta

sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan kebutuhan komunitas.

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dengan pendekatan holistik menawarkan pembelajaran penting tentang bagaimana keterlibatan komunitas dapat memperkuat pengelolaan sumber daya. Peluang yang dapat dimanfaatkan termasuk pengembangan model pengelolaan yang dapat direplikasi di wilayah lain, peningkatan kapasitas lokal untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal untuk pengelolaan yang lebih efektif. Penguatan strategi pengelolaan perikanan berbasis masyarakat dengan pendekatan holistik merupakan langkah penting menuju pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dan mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan, strategi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas pesisir. Dukungan regulasi yang kuat, perencanaan yang komprehensif, dan pelaksanaan yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal.

Adapun hasil yang tercapai melalui pelaksanaan workshop ini adalah:

1. Peserta workshop mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ekonomi biru, dan teknik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta berbagai keterampilan untuk membudidayakan hasil laut yang ramah lingkungan.
2. Peserta workshop menunjukkan keterlibatan aktif dalam diskusi dan perencanaan terhadap berbagai program guna mendukung pengembangan ekonomi biru dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peserta workshop, diharapkan mampu untuk mengelola sebuah permasalahan terkait dengan hambatan sosial dan kultural dalam peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut.
4. Hasil dari workshop ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Labuhan Sangoro dan sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.

## KESIMPULAN

Penerapan Ekonomi Biru merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil memastikan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini, yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana dan berkelanjutan, berhasil menunjukkan potensi besar dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan terstruktur, pembentukan kelompok usaha, dan pengembangan teknologi telah membuahkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Selain itu, networking yang terjalin selama workshop memberikan keuntungan strategis dengan membuka saluran komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, memperkuat dukungan untuk implementasi inisiatif berbasis Ekonomi Biru.

Namun, untuk memaksimalkan manfaat, perlu adanya langkah-langkah tindak lanjut yang sistematis. Saran yang diajukan termasuk perlunya melanjutkan dan memperluas program pelatihan serta memastikan dukungan finansial dan teknis yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Penguatan jaringan kolaborasi harus terus dilakukan untuk memperluas akses ke sumber daya dan peluang. Selain itu, implementasi mekanisme evaluasi yang teratur sangat penting untuk memantau kemajuan, menilai dampak, dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pendekatan ini akan memastikan bahwa inisiatif Ekonomi Biru di Labuhan Sangoro dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun 2024 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik, Universitas Mataram mengucapkan terima kasih tidak terhingga, sekaligus mengapresiasi segenap sumbangsih pemikiran dan tenaga dari semua pihak dari awalnya kegiatan ini sampai akhir kegiatan. Kesuksesan kegiatan PKM ini tidak terlepas dari kerjasama

yang baik dan dukungan semua pihak, terutama panitia pelaksana dan pihak organisasi kepemudaan dan komunitas kepemudaan Labuhan Sangoro-Sumbawa

#### DAFTAR PUSTAKA

- Desa Labuhan Sangoro. (2023). Data Penduduk Desa Labuhan Sangoro Tahun 2023 (p. 1).
- Donna NP Butarbutar, Lelo Sintani, & Luluk Tri Harinie. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37304/jem.v1i1.1203>
- Nain, U. (2022). Analysis of Coastal Community Development in Makassar City, South Sulawesi Indonesia. *Sosiohumaniora*, 24(3), 392. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i3.35845>
- Nainggolan, M. C., Naomi, N., Siregar, I., & Purnomo, B. (2023). Menilik Budaya Maritim Dari Masyarakat Pesisir Sekitar Pulau Jawa Tahun 1920. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 2(1), 102–110. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i1.24261>
- Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). STRATEGI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN a. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46–64.
- Rizal, L., Ardhana, I., & Wiryatno, J. (2014). Kajian Degradasi Lahan Mangrove di Pesisir Desa Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa. *Ecotrophic*, 8(1), 17–23.
- Susilowati, E. (2019). Historiography of Coastal Communities in Indonesia. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 3(2), 89–96. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v3i2.6261>
- Teguh Kadyat Yudharto, S.T., M. M. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Konsep Blue Economy Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
- Thomsen, D. C., Smith, T. F., Carter, R. W., & Mayes, G. (2009). Defining community: Understanding the meaning of “the community” in coastal zone management. *Journal of Coastal Research*, SPEC. ISSUE 56, 1316–1319.
- Yonvitner, Susanto, H. A., & Yuliana, E. (2016). Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir. In *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut* (pp. 1–39).